

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

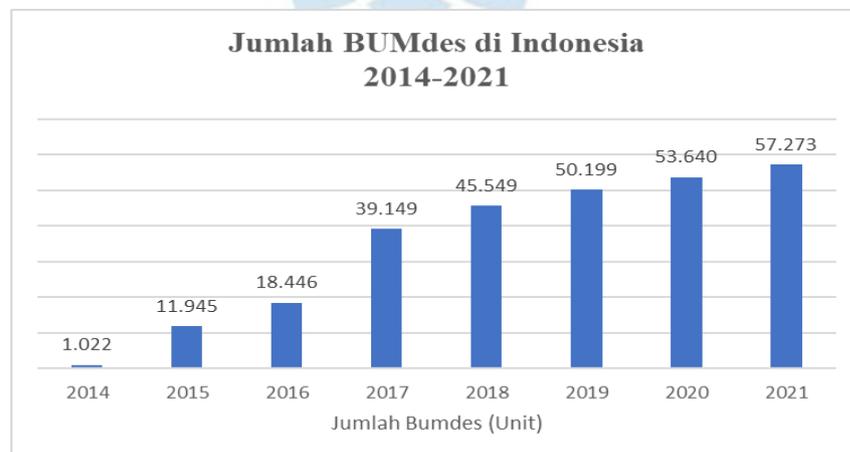
Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas dan melimpahnya sumber daya alam. Potensi ini seharusnya memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya negara ini masih menghadapi beberapa masalah yang serius, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, masalah kemiskinan yang tak kunjung teratasi, tantangan dalam bidang pendidikan, dan kesenjangan ekonomi yang masih menjadi isu utama hingga saat ini. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam memajukan taraf hidup masyarakat terutama pada perekonomian masyarakat yaitu adanya pembangunan nasional. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan nasional dapat terwujud dengan memiliki lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Negara perlu mengelola dan mengatur sistem ekonomi dengan bijaksana, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan pelaku ekonomi menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat (Hikmawati, 2021).

Pembangunan nasional diterapkan mulai dari dasar pemerintahan dengan cara memperkuat daerah-daerah kecil seperti desa. Desa merupakan titik awal pemerintahan dan pondasi utama kehidupan bermasyarakat. Desa juga dipandang sebagai daerah yang miskin, keterbelakangan dan adanya kesenjangan (Hikmawati, 2021). Berdasarkan anggapan tersebut, maka masyarakat desa kini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat dalam menciptakan berbagai kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan dengan cara menghimpun kegiatan ekonomi. Maka lahirlah lembaga ekonomi yang dikelola masyarakat yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa dimana diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian di suatu desa, memberikan tambahan bagi pendapatan asli desa. BUMDes sebagai badan hukum, dibangun atas dasar peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan persetujuan yang terjalin dengan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 yang dimana BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau mayoritas modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa (PKDSP, 2007). Tujuan BUMDes adalah untuk mengelola berbagai barang, jasa, aset, dan layanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil usaha BUMDes sebagaimana dalam Pasal 89 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa hasil BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian dorongan bagi masyarakat miskin dalam bentuk sumbangan, dukungan sosial, serta program anggaran bergulir yang dituangkan dalam APBDes. Bentuk BUMDes pada setiap desa yang terdapat di Indonesia tentu beraneka ragam. Karena keanekaragaman ini sesuai dengan potensi, karakter lokal, serta sumber daya yang dimiliki pada setiap desa. Tidak hanya itu, peraturan selanjutnya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing.

Gambar 1.1 Jumlah BUMDes Di Indonesia Tahun 2014-2021



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT)

Berdasarkan pada Gambar 1.1, menurut data Kementerian Desa, tercatat jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meningkat jauh di

seluruh Indonesia dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 57.273 unit pada tahun 2021. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah BUMDes di Indonesia terus bertambah. Maka dari itu, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian desa serta masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola potensi desa dan memajukan usaha lokal.

Pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berupaya semaksimal mungkin untuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh desa di wilayah tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi telah mengambil langkah konkret dengan menetapkan target agar setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2023. Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan mendorong perkembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan lahirnya 1.400 BUMDes pada periode tahun 2018 hingga 2021. Beberapa wilayah di Jawa Barat menonjol dengan jumlah BUMDes terbanyak, yaitu Kabupaten Sukabumi dengan 381 BUMDes, Kabupaten Bogor dengan 280 BUMDes, dan Kabupaten Bandung dengan 270 BUMDes (Yunita&Mafruhah, 2022). Keberadaan BUMDes di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mengoptimalkan potensi lokal, serta mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil.

Kehadiran BUMDes di Kabupaten Bandung menjadi langkah strategis untuk meningkatkan potensi ekonomi di setiap desa, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, BUMDes diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan peluang kerja di wilayah tersebut. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2010 mencantumkan tujuan dari pembentukan BUMDes yakni guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka memajukan kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, meningkatkan potensi pada perekonomian daerah, menekan kemajuan usaha mikro serta sektor informal, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan potensi SDA (sumber daya alam) yang dimiliki desa guna memberikan nilai tambah (Nataprawira, 2010). Masing-masing BUMDes di Kabupaten Bandung memiliki unit usaha unggulan yang berbeda-beda, seperti pengelolaan air bersih, pariwisata, simpan pinjam, jasa, perdagangan, produksi, pertanian, peternakan, persewaan, pasar, konveksi, dan lain sebagainya. Masing-masing unit usaha yang dimiliki BUMDes sudah dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi desa dan masyarakat.

Di Kabupaten Bandung hingga tahun 2023 telah memiliki sekitar 270 BUMDes, namun hanya 138 BUMDes yang aktif. Dari 138 BUMDes yang aktif terdapat klasifikasi maju, berkembang, pemula dan rintisan.

Penilaian klasifikasi tersebut berdasarkan kelengkapan data yang diisi oleh setiap BUMDes yang telah disediakan oleh Kementerian Desa.

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes Berdasarkan Kategorinya di Kabupaten Bandung Pada Bulan Februari 2023

Klasifikasi BUMDes	Jumlah BUMDes
Maju	17
Berkembang	82
Pemula	20
Perintis	19

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

Berdasarkan data diatas, pada bulan februari 2023 terlihat bahwa mayoritas BUMDes di Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori berkembang dengan jumlah yang cukup signifikan yakni 82 BUMDes. Namun, jumlah BUMDes yang telah mencapai kategori maju jauh lebih sedikit, hanya terdiri dari 17 BUMDes. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa ada ruang besar untuk peningkatan dan perkembangan lebih lanjut di sektor BUMDes di Kabupaten Bandung.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Cileunyi. Jumlah desa di Kecamatan Cileunyi yaitu berjumlah 6 desa. Seluruh desa di Kecamatan Cileunyi sudah mendirikan BUMDes guna memanfaatkan potensi yang ada pada masing-masing desa. Berikut adalah data BUMDes seluruh desa yang berada di Kecamatan Cileunyi:

Tabel 1.2 Data BUMDes Kecamatan Cileunyi Tahun 2023

No	Desa	Nama BUMDes	Klasifikasi
1	Cibiru Hilir	Abimantrana	Berkembang
2	Cibiru Wetan	Mawa Raharja	Berkembang
3	Cileunyi Kulon	Cileunyi Kulon	Pemula
4	Cileunyi Wetan	Berkah Abadi	Berkembang
5	Cimekar	Mandala Mekar	Berkembang
6	Cinunuk	Cinunuk	Pemula

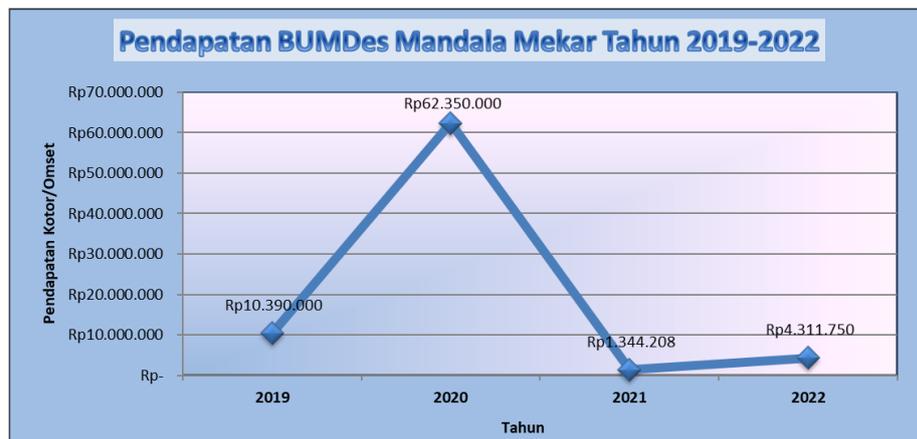
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Cileunyi telah memiliki BUMDes, namun belum ada satupun yang termasuk klasifikasi maju dan banyaknya di klasifikasi berkembang, dimana salah satunya yaitu Desa Cimekar.

Desa Cimekar sudah menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dinamai Mandala Mekar. BUMDes Mandala Mekar telah berdiri sejak tahun 2016 hingga sekarang. Adanya unit usaha BUMDes dilihat dari karakteristik masyarakat, ada empat program yang direncanakan di Mandala Mekar yaitu: Unit usaha perdagangan umum, agen PT. POS Indonesia Persero, usaha perdagangan GAS LPG 3kg, dan Mitra penyedia jaringan internet. Akan tetapi, yang terealisasi sampai saat ini dari empat program hanya satu program yang tidak berjalan yaitu program Unit usaha

perdagangan umum karena mengalami kerugian sehingga program dihentikan.

Gambar 1.2 Pendapatan BUMDes Mandala Mekar Tahun 2019-2022



Sumber: BUMDes Mandala Mekar

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, dapat dilihat pendapatan BUMDes Mandala Mekar dari tahun 2019-2022 mengalami naik turun apalagi tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana salah satu penyebabnya yaitu diakibatkan oleh wabah covid-19 mulai merabak yang dimana masyarakat harus menaati peraturan pemerintah untuk tidak melakukan banyak aktivitas diluar rumah. BUMDes Mandala Mekar juga sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, berdasarkan observasi awal, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk modal unit usaha Rp. 100.000.000,- sedangkan target anggaran tahun 2022 adalah Rp. 300.000.000,-. Keterbatasan modal usaha ini mempengaruhi operasional BUMDes dan berdampak pada keterbatasan program yang dapat dijalankan oleh BUMDes dan terlihatnya program yang dijalankan masih sedikit.

Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan BUMDes tercermin dari kemampuan pengelolaannya. Jika dijalankan dengan maksimal, BUMDes dapat berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan yang berarti (Novita Riyanti & Hermawan Adinugraha, 2021). Maka dari itu, faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan BUMDes selain modal uang adalah sumber daya manusia (SDM). Pada BUMDes Mandala Mekar, terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Keterbatasan SDM dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan BUMDes dan kemampuan dalam mengoptimalkan potensi desa. Hal tersebut berdampak pada unit usaha BUMDes belum berhasil mengurangi tingkat pengangguran di Desa Cimekar.

Selain modal usaha dan sumber daya manusia, dalam mencapai tujuan program BUMDes diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk mendukung keberhasilan program-program dari BUMDes. Selain itu, diperlukan kebijaksanaan pemerintah Desa dan pengelola BUMDes untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan BUMDes. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan BUMDes yaitu dengan adanya komunikasi antara pengelola BUMDes kepada masyarakat (Tiballa, 2017). Komunikasi disini yaitu sosialisasi atau penyuluhan. Namun, BUMDes Mandala Mekar

dalam pelaksanaannya belum melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara komprehensif sehingga sebagian masyarakat kurang paham terkait urgensi dan peran keberadaan BUMDes.

Dari penjelasan latar belakang di atas, BUMDes Mandala Mekar diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga berperan dalam mendorong terbentuknya demokrasi sosial di desa. Peneliti menemukan bahwa adanya kendala pada pelaksanaan program BUMDes Mandala Mekar ini yang menghalangi gerak laju perkembangan BUMDes dalam memperkuat perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu peneliti sangat ingin mengkajinya dengan judul **“Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyertaan modal yang masih terbatas sehingga mempengaruhi kemampuan BUMDes Mandala Mekar dalam mengembangkan usahanya.
2. Keterbatasan SDM yang ada, dengan jumlah staf yang sedikit mengakibatkan terbatasnya keahlian dan pengetahuan.

3. Kurangnya upaya komunikasi dan sosialisasi yang efektif mengenai BUMDes menyebabkan banyak masyarakat desa belum sepenuhnya memahami dan terlibat dalam kegiatan BUMDes.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kondisi lingkungan terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh hubungan antar organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh sumber daya organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh karakteristik dan kemampuan agen pelaksana terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana secara simultan terhadap perekonomian masyarakat pada

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi lingkungan terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan antar organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik dan kemampuan agen pelaksana terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana secara simultan terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan rinci terkait pengaruh implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat desa, dapat dijadikan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan daya guna pengelolaan BUMDes dan memberikan kontribusi teori dan analisis guna menambah wawasan ataupun kebutuhan, pengalaman dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini sanggup menambah wawasan perihal pengaruh implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini pun diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik pada konsentrasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Perguruan Tinggi yang dimana tempat peneliti menimba ilmu.

Bagi BUMDes Mandala Mekar, diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivasi dan masukan yang bersifat positif yang dapat meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Mekar agar masyarakat termotivasi dalam mengembangkan potensi BUMDes sehingga perekonomian masyarakat meningkat, lalu dapat sesuai dengan yang diharapkan di Desa Cimekar.

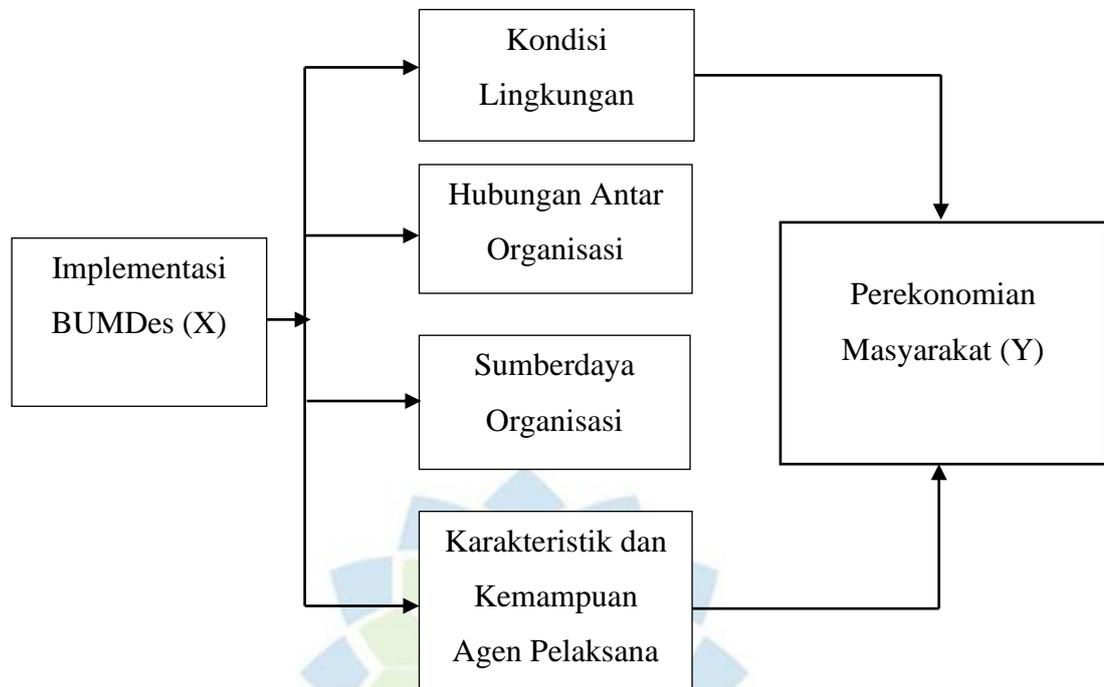
1.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa sejatinya pembentukan BUMDes di Kabupaten Bandung dilakukan untuk membantu ekonomi masyarakat selain sebagai sarana usaha desa yang bisa mendorong Pendapatan Asli Desa (PADes) (Mildan, 2021). Namun, implementasi BUMDes tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa sebagai fasilitator pelaksanaan program BUMDes. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melaksanakan programnya dalam mendukung implementasi BUMDes di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat (1) dan Peraturan Perundang-Undangan No. 6 tahun 2014 merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan untuk pendirian BUMDes dan menjelaskan tujuan serta fungsi yang diemban oleh BUMDes. BUMDes dibentuk dengan maksud untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, salah satunya adalah memperkuat perekonomian masyarakat. Penguatan ekonomi masyarakat merupakan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Cimekar untuk memperkuat ekonomi masyarakat adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinamai Mandala Mekar. Dengan adanya BUMDes Mandala Mekar, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes Mandala Mekar harus dikelola dengan efektif agar rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik. Dengan mengelola BUMDes Mandala Mekar secara efektif, diharapkan masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan juga akan membantu dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Rondinelli dan Cheema (Subarsono, 2010) dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumberdaya Organisasi, dan Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Sedangkan Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Perekonomian Masyarakat sebagaimana dalam (Hasan & Azis, 2018).

Tabel 1.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil olahan penulis, 2023

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan respon awal terhadap perumusan masalah penelitian. Respon ini didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta empiris. Melalui hipotesis, dapat menghubungkan teori dengan pengamatan atau sebaliknya. Data akan dikelola menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Untuk mencapai tujuan penelitian, berikut beberapa hipotesis yang akan diuji:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh kondisi lingkungan terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

H₁: Terdapat pengaruh kondisi lingkungan terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. H₀: Tidak ada pengaruh hubungan antar organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

H₁: Terdapat pengaruh hubungan antar organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

3. H₀: Tidak ada pengaruh sumber daya organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

H₁: Terdapat pengaruh sumber daya organisasi terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

4. H₀: Tidak ada pengaruh karakteristik dan kemampuan agen pelaksana terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

H₁: Terdapat pengaruh karakteristik dan kemampuan agen pelaksana terhadap perekonomian masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

5. H_0 : Tidak ada pengaruh secara simultan implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

H_1 : Terdapat pengaruh secara simultan implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

